



SKENARIO PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAN ARAH PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PROVINSI RIAU, SUATU ANALISIS EKONOMI JANGKA PENDEK

*Scenario of Increasing Tax Revenue and Direction of Economic Growth
Riau Province Region, A Short Term Economic Analysis*

Poerwaningsih S. Legowo
pur_transport@yahoo.com
Universitas Kristen Indonesia

Adolf B. Heatubun
adolf_bas@yahoo.com
Universitas Pattimura

Abstract

A study has been conducted in Riau Province in 2016 - 2018. One of the objectives of this research is to provide alternative policies for the regional government of Riau Province to encourage regional economic growth. The system of simultaneous econometric modeling is used and estimated by the method of Two Stage Least Squares and SIMNLIM method for simulation using 33 years time series data (1984 - 2016). The results showed that the alternative policy of increasing 10% tax revenue increased local revenue by 8.32% and government expenditure by 0.43%. Conversely, an increase in tax revenues has an impact on reducing public consumption by 0.10%, which in turn decreases RGDP by 0.01%. However, the decline in RGDP did not contribute to the decline in investment. The accumulated impact of the decline in consumption and the increase in private investment caused public savings to increase by a relatively small 0.03% so that the interest rate dropped 0.27%. The impact of the decline in RGDP caused the demand for money to decline by 0.04%.

Keywords: tax revenue, the impact of change, regional economic growth, economic fluctuations, short term

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Provinsi Riau sama halnya Pemerintah Daerah lain mengejar pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi di wilayah dapat digerakan oleh beberapa faktor yang merupakan kekuatan wilayah itu sendiri. Faktor-faktor ketersediaan sumberdaya alam yang merupakan basis untuk produksi sektoral dijadikan potensi utama mendorong pertumbuhan wilayah. Disamping itu, faktor-faktor penarik dari sisi permintaan juga merupakan potensi penting sebagai pasar bagi produksi wilayah.

Pada satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan informasi mengenai semua faktor pendukung yang kuat mendorong pertumbuhan, dan pada sisi lain diperlukan spesifikasi alternatif kebijakan yang perlu diambil dan dampak yang ditimbulkan untuk pencapaian pertumbuhan. Secara teoritis, tersedia berbagai pilihan kebijakan diantaranya perluasan investasi dalam berbagai proyek pembangunan, ekspansi anggaran pemerintah daerah, peningkatan konsumsi masyarakat, dan peningkatan kapasitas keuangan daerah yang mendukung berbagai transaksi di masyarakat.

Terlepas dari berbagai faktor pendukung kuat yang potensial dapat pilih sebagai instrumen untuk mengejar pertumbuhan ekonomi wilayah, fakta menunjukkan bahwa kecenderungan pemerintah daerah mengupayakan pertumbuhan dimulai dengan instrumen peningkatan penerimaan pajak. Instrumen pajak sendiri merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal dan dapat digunakan pemerintah daerah

mengarahkan ekonomi wilayah menuju pertumbuhan (Harelimana, 2018; Salome *et al*, 2016; Macek, 2014; Ferede dan Dahlby, 2012; Nizar, 2011; Padda dan Akram, 2009). Peningkatan penerimaan pajak diketahui berkontribusi langsung pada penerimaan daerah dan menjadi bagian utama dalam mengisi pengeluaran pemerintah.

Secara teoritis umumnya peningkatan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan mensejahterakan masyarakat. Pada satu sisi, peningkatan pengeluaran pemerintah memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan yang meningkatkan kapasitas produksi daerah, memperluas lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja bagi wilayah. Pada sisi lain kebijakan fiskal yang ditempuh dengan peningkatan penerimaan pajak, umumnya bagi pemerintah daerah dianggap tidak merubah keputusan pelaku ekonomi dan tidak mengurangi kemampuan dan kapasitas kegiatan ekonomi yang ada. Bahkan bagaimana efek dari kebijakan peningkatan penerimaan pajak terhadap perekonomian seringkali diabaikan oleh pemerintah daerah yang hanya fokus pada upaya peningkatan penerimaan pajak.

Konsep teori menjelaskan bahwa kebijakan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat menurunkan pertumbuhan dari variabel-variabel seperti investasi dan konsumsi (Mankiw, 2013). Efek dari penurunan beberapa indikator ekonomi ini akan memiliki akumulasi efek terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan akan mempengaruhi keberlanjutan kebijakan yang ada maupun keterpaduan antar instrumen kebijakan (kombinasi) yang sesuai bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Paper ini bertujuan memperlihatkan dan membahas dampak peningkatan penerimaan pajak terhadap beberapa indikator pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Riau.

KERANGKA TEORITIS

Pajak memiliki arti sebagai kontribusi wajib dari perorangan maupun badan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pada barang dan jasa publik (Kiprotich, 2016). Pengumpulan pajak oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengembangkan pelayanan umum dan memajukan pembangunan. Oleh karena itu pajak dijadikan sumber utama dalam mengisi pendapatan pemerintah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber-sumber yang sah bagi pendapatan pemerintah. Bagi pemerintah di daerah, pendapatan ini disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi hak yang diakui dan dipungut sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kemenkeu, 2015).

Sumber pendapatan pemerintah daerah diantaranya adalah pajak dan dijadikan instrumen utama pendapatan serta menjadi bagian dalam pos PAD. Sumber pendapatan ini dijadikan dasar untuk menentukan seberapa besar pengeluaran yang perlu ditetapkan. Semakin besar kemampuan pendapatan yang diterima pemerintah untuk membiayai semua pengeluarannya maka anggaran pemerintah dimaksud disebut memiliki kemandirian (Waluyo, 2009).

Baik pajak maupun pengeluaran pemerintah keduanya merupakan instrumen penting kebijakan fiskal dan beserta komponen agregat lainnya seperti konsumsi dan investasi, bersama-sama menentukan pertumbuhan ekonomi. Blanchard dan Johnson (2013) menyatakan output perekonomian ditentukan oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah. Kemampuan mengkonsumsi masih ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang diterima dan pengeluaran pajak. Makin tinggi pendapatan, makin tinggi konsumsi tetapi makin besar pengeluaran pajak akan menekan konsumsi. Selain melakukan konsumsi, masyarakat juga melakukan saving yang mana saving bergantung pada suku bunga di pasar keuangan. Investasi yang merupakan komponen penting dalam penciptaan output, sangat bergantung pada besarnya suku bunga yang berlaku. Karena suku bunga merupakan beban biaya berinvestasi maka semakin tinggi suku bunga akan menekan besarnya investasi.

Saling keterkaitan yang searah maupun berlawanan antar komponen output perekonomian ini akan menentukan arah gerak pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Dasar keterkaitan dimaksud digunakan untuk menunjukkan bahwa ekspansi penerimaan pajak dapat mendorong maupun menekan pertumbuhan tergantung seberapa kuat efek yang terjadi pada masing-masing komponen. Efek mendorong pertumbuhan seperti ditunjukkan oleh Harelimana (2018) dan banyak penulis lainnya. Sementara efek yang menekan pertumbuhan melalui komponen-komponen output agregat seperti yang ditunjukkan oleh Hakim dan Bujang (2012), Baranová dan Janícková (2012), Hodo (2013), dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah berlangsung di Provinsi Riau dari bulan Oktober 2016 sampai Oktober 2018. Data untuk kebutuhan analisis berasal dari data sekunder (*time series data*) dari tahun 1984 hingga 2016 (33 item data). Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, dan Bank Indonesia Pusat maupun Provinsi. Analisis dan pembahasan mengenai dampak penerimaan pajak diperoleh berdasarkan model ekonometrika sistem persamaan yang dibangun menurut konsep *Aggregate Demand* jangka pendek. Model sistem persamaan merupakan abstraksi atau representasi dari fenomena aktual (Koutsoyiannis, 2000; Intriligator *et al*, 2003; Pindyck and Rubinfeld, 2008) yang dipresentasikan dalam model fluktuasi ekonomi jangka pendek Provinsi Riau.

Spesifikasi model menggunakan pendekatan IS - LM sebagaimana konsep makroekonomi (Blanchard and Johnson, 2013), dan bentuk sistem persamaan ekonometrika adalah sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = \text{CON} + \text{INVD} + \text{GOV} \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{MS} = \text{MD} \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{CON} = a_0 + a_1 \text{PDRB} + a_2 \text{TAX} + a_3 \text{SAV} + a_4 \text{MD} + a_5 \text{POP} + u_1 \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{INVD} = b_0 + b_1 \text{IR} + b_2 \text{INVG} + b_3 \text{GPDRB} + b_4 \text{PMA} + b_5 \text{PMDN} + u_2 \dots\dots\dots(4)$$

$$\text{GOV} = c_0 + c_1 \text{PAD} + c_2 \text{INVG} + c_3 \text{DAU} + c_4 \text{GPRDB} + u_3 \dots\dots\dots(5)$$

$$\text{PAD} = d_0 + d_1 \text{TAX} + d_2 \text{RETR} + d_3 \text{LBUMD} + d_4 \text{GPDRB} + u_4 \dots\dots\dots(6)$$

$$\text{SAV} = e_0 + e_1 \text{IR} + e_2 \text{PDRB} + e_3 \text{CON} + e_4 \text{GOV} + u_5 \dots\dots\dots(7)$$

$$\text{IR} = f_0 + f_1 \text{SAV} + f_2 \text{INVD} + f_3 \text{MD} + u_6 \dots\dots\dots(8)$$

$$\text{MD} = g_0 + g_1 \text{IR} + g_2 \text{PDRB} + u_7 \dots\dots\dots(9)$$

Keterangan :

- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Rp)
- CON = Konsumsi masyarakat (Rp)
- INVD = Permintaan investasi (Rp)
- GOV = Pengeluaran pemerintah (Rp)
- MS = Jumlah uang beredar di masyarakat (Rp)
- MD = Jumlah permintaan uang (Rp)
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (Rp)
- SAV = Jumlah tabungan masyarakat (Rp)
- IR = Tingkat suku bunga (%)
- TAX = Penerimaan pajak (Rp)
- POP = Jumlah populasi (orang)
- INVG = Jumlah investasi pemerintah (Rp)
- GPDRB = Laju PDRB wilayah (%)
- PMA = Penanaman modal asing (Rp)
- PMDN = Penanaman modal dalam negeri (Rp)
- DAU = Dana Alokasi Umum (Rp)
- RETR = Penerimaan retribusi daerah (Rp)
- LBUMD = Laba Badan Usaha Milik Daerah (Rp).

Sebelum diestimasi, model yang dibangun telah diidentifikasi sesuai dalil *order condition* dan telah memenuhi kriteria untuk dapat diestimasi yaitu seluruh persamaan adalah "*overidentified*", selanjutnya

diestimasi dengan metode 2 SLS (*Two Stage Least Squares*). Evaluasi terhadap estimasi model memberikan hasil yang baik yaitu semua peubah yang dimasukan ke dalam setiap persamaan memenuhi hipotesis ekonomi. Nilai Koefisien Determinasi semua persamaan cukup tinggi, nilai probabilitas F semua persamaan < 0.0001, dan teloransi nilai uji t menunjukkan masing-masing peubah penjelas berpengaruh nyata terhadap peubah endogen.

Untuk analisis simulasi tentang dampak peningkatan penerimaan pajak, model telah divalidasi untuk mengetahui kelayakan model dengan menggunakan kriteria *Root Mean Squares Error* (RMSE), *Root Mean Squares Percent Error* (RMSPE) dan *U-Theil* (*Theil's Inequality Coefficient*). Nilai-nilai kriteria RMSE, RMSPE dan U-Theil yang diharapkan adalah kecil yakni mendekati nol. Hasil validasi model disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Validasi Model Fluktuasi Ekonomi Jangka Pendek, Provinsi Riau

Peubah Endogen	Statistik Validasi		
	RMSE	RMSPE	U-Theil
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	16842805	39.7159	0.0497
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat (CON)	1644542	7.1706	0.0104
Pengeluaran Investasi Swasta (INVD)	8863468	33.9292	0.0552
Pengeluaran Pemerintah (GOV)	7300156	689.7	0.3173
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41026.9	31.6444	0.0138
Tabungan Masyarakat (SAV)	895026	1151.0	0.0323
Suku Bunga (IR)	6.5819	39.4482	0.1969
Permintaan Uang (MD)	2023077	134.3	0.0324

Sumber : Hasil analisis data (*print out komputer*), 2018

Sesuai hasil pada Tabel 1, kriteria RMSE tidak memenuhi syarat karena hampir semua peubah endogen bernilai sangat besar (> 100). Kriteria yang memenuhi syarat adalah RMSPE dan U-Theil. Sebanyak 5 peubah endogen atau sebesar 62.50% yang memiliki nilai RMSPE < 100 dan 7 peubah endogen atau sebesar 87.50% memiliki nilai U-Theil < 0.20. Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2008) nilai U-Theil bernilai lebih kecil dari 0.20 menunjukkan model tidak mengalami *bias* sistematis, model secara tepat menggantikan variasi dari variabel dependen, *error* simulasi berfluktuasi karena acak (*random*). Hasil prediksi model di atas telah memenuhi kriteria statistik dimaksud sehingga model dinyatakan valid untuk digunakan dalam simulasi perubahan faktor eksternal dan alternatif kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil simulasi peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 10 % disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Simulasi Peningkatan Penerimaan Pajak Provinsi Riau

Peubah Endogen	Dampak Kenaikan Penerimaan Pajak 10 %	
	Nilai	(%)
Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rp)	-10000	-0.01
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat (Juta Rp)	-63337	-0.10
Pengeluaran Investasi Swasta (Juta Rp)	20147	0.03
Pengeluaran Pemerintah (Juta Rp)	35170	0.43
Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp)	75838	8.32

Tabungan Masyarakat (Juta Rp)	2525	0.03
Suku Bunga (%)	-0.04	-0.27
Permintaan Uang (Juta Rp)	-7349	-0.04

Sumber : Hasil analisis data (*print out* komputer), 2018

Hasil simulasi pada Tabel 2 menunjukkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 10% berdampak meningkatkan pendapatan asli daerah 8,32% atau senilai Rp. 75.838,- juta. Peningkatan pajak juga berdampak meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 0,43% atau senilai Rp. 35.170,- juta. Pada sisi lain peningkatan penerimaan pajak berdampak menurunkan konsumsi masyarakat 0,10% atau dengan nilai Rp. 63.337,- juta, selanjutnya penurunan konsumsi menurunkan PDRB 0,01% atau senilai Rp. 10.000,- juta. Penurunan PDRB yang relatif kecil ini berdampak lanjutan tidak menurunkan investasi swasta melainkan investasi tetap meningkat sebesar 0,03% atau dengan nilai Rp. 20.147,- juta. Akumulasi dampak konsumsi yang menurun dan investasi swasta yang meningkat mengakibatkan tabungan masyarakat juga meningkat sebesar 0,03% atau senilai Rp. 2.525,- juta yang seterusnya menurunkan suku bunga sebesar 0,27%. Selain itu, dampak penurunan pada PDRB berdampak menurunkan permintaan uang sebesar 0,04% atau senilai Rp. 7.349,- juta.

Berdasarkan hasil simulasi di atas, besaran standar peningkatan penerimaan pajak yang umumnya dikejar pemerintah daerah untuk dicapai yaitu sebesar 10% memiliki dampak cukup besar meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Riau 8,32%. Sebagaimana diketahui sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari beberapa sumber yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kemenkeu, 2015). Nilai PAD merupakan akumulasi maka peningkatan masing-masing komponen sumber akan meningkatkan jumlah PAD yang diperoleh. Beberapa hasil penelitian di Indonesia menunjukkan baik pajak maupun retribusi daerah bersama-sama berpengaruh positif meningkatkan pendapatan asli daerah, berarti peningkatan penerimaan pajak menyebabkan peningkatan PAD (Zahari, 2017; Mufidah dan Susyanti, 2017). Juga hasil temuan di Nigeria menyatakan pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD yakni peningkatan penerimaan pajak memiliki efek nyata meningkatkan PAD (Omodero, *et al.*, 2018; Samuel and Tyokoso, 2014).

Bila dirinci secara fisik mengenai seberapa besar rasio penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Riau selama 10 tahun terakhir (2007 – 2016) maka data penelitian menunjukkan rata-rata rasio penerimaan pajak terhadap PAD adalah sebesar 80%. Ini menunjukkan jumlah penerimaan pajak dominan membentuk pendapatan asli daerah, sementara komponen sumber lainnya hanya bagian yang kecil. Hasil analisis mengenai kontribusi pajak terhadap PAD di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menyatakan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 12% (Kamaroellah, 2015). Sesuai hasil kenaikan 8,32% pendapatan asli daerah sebagai dampak peningkatan 10% penerimaan pajak, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Riau sangat bergantung pada besarnya penerimaan pajak.

Dampak peningkatan penerimaan pajak (10%) juga terkait erat dengan pengeluaran pemerintah yakni pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 0,43% atau senilai Rp. 35.170,- juta. Waluyo (2009) menyatakan anggaran negara disebut mandiri jika semua pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan kemampuan pemerintah sendiri, yang mana berasal dari penerimaan pajak. Begitu juga Taha dan Lognathan (2008) menyatakan perubahan dalam penerimaan pajak memiliki efek positif terhadap pengeluaran pemerintah, jika mengurangi tarif pajak langsung dan tidak langsung menyebabkan penurunan pengeluaran pemerintah di masa depan. Baik Waluyo (2009) maupun Taha dan Lognathan (2008) keduanya searah mendukung bahwa peningkatan penerimaan pajak memiliki efek positif meningkatkan pengeluaran pemerintah. Kecilnya kenaikan pengeluaran pemerintah (0,43%) sebagai dampak peningkatan penerimaan pajak 10% di Provinsi Riau dapat dijelaskan oleh kondisi fisik rasio pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang rata-rata besarnya dalam 10 tahun terakhir (2007 – 2016) hanya mencapai 13,62%. Kecilnya rasio ini menunjukkan pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Riau lebih dominan dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya selain pajak daerah. Ini menunjukkan peranan pajak daerah masih relatif kecil mendanai sendiri pembangunan wilayah.

Mengejar pencapaian peningkatan penerimaan pajak daerah 10%, tidak terhindari dari dampak yang menurunkan konsumsi masyarakat sebesar 0,10% (senilai Rp. 63.337,- juta). Dampak penurunan konsumsi berlanjut menurunkan PDRB 0,01% (senilai Rp. 10.000,- juta). Model IS-LM dalam teori makroekonomi menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat sangat bergantung pada *disposable income* yang

mana *disposable income* dipengaruhi oleh pajak. Kenaikan pajak akan menurunkan *disposable income* sehingga menurunkan konsumsi yang pada akhirnya menurunkan pendapatan (output) nasional (Blanchard and Johnson, 2013). Hasil studi Hakim dan Bujang (2012) menyatakan peningkatan penerimaan pajak akan menaikkan pajak atas barang dan jasa sehingga mengurangi konsumsi yang seterusnya menurunkan PDB. Penurunan konsumsi memiliki arti daya beli masyarakat pada barang dan jasa menurun. Baranová dan Janíčková (2012) melakukan studi pada negara-negara Uni Eropa untuk memverifikasi hubungan negatif antara pajak perusahaan dengan pertumbuhan ekonomi. Mereka menemukan bahwa peningkatan pajak menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang pada negara-negara tersebut.

Prosentase penurunan konsumsi masyarakat di Provinsi Riau mungkin cukup kecil (0,10%) sebagai dampak peningkatan penerimaan pajak (10%) tetapi sesuai nilai dapat mencapai Rp. 63.337,- juta. Ini menunjukkan bahwa pengejaran peningkatan penerimaan pajak memberikan dampak negatif bagi konsumsi masyarakat. Di lain pihak konsumsi masyarakat merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi wilayah. Karena itu jika konsumsi masyarakat sangat utama menggerakkan perekonomian wilayah, maka dampak peningkatan penerimaan pajak memiliki efek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Data penelitian menunjukkan rata-rata kontribusi konsumsi masyarakat terhadap PDRB Riau sebesar 30,78% selama 10 tahun terakhir (2007 – 2016).

Upaya mengejar peningkatan penerimaan pajak daerah (10%) berdampak tidak menurunkan investasi swasta, sebaliknya investasi meningkat dalam ukuran kecil (0,03% atau senilai Rp. 20.147,- juta). Sementara dampak konsumsi menurun dan investasi swasta meningkat mengakibatkan tabungan meningkat (0,03%) yang kemudian diikuti suku bunga menurun 0,27%. Selain itu, penurunan pada PDRB berdampak menurunkan permintaan uang sebesar 0,04% (senilai Rp. 7.349,- juta). Hasil penelitian Hodo (2013) di Albania menyatakan peningkatan tarif pajak menyebabkan investasi menurun, tetapi rezim pajak tetap yang dijalankan oleh pemerintah telah mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong produksi modal, dan menaikkan kapasitas investasi asing. Karena itu penyederhanaan sistem pajak akan mendorong investasi dan pertumbuhan jangka menengah.

Kaitan penelitian Hodo (2013) dengan hasil penelitian ini adalah jika pemerintah daerah tidak menaikkan tarif pajak yakni besaran pajak per unit kegiatan maka ekspansi investasi tidak terpengaruh. Selanjutnya peningkatan penerimaan pajak melalui penyederhanaan sistem pengumpulan dan perluasan kepada wajib pajak akan memungkinkan pencapaian tingkat penerimaan pajak lebih tinggi tanpa mengurangi kapasitas investasi yang terjadi. Hasil ini membenarkan dampak simulasi yang diperoleh.

Terdapat dampak yang saling berkaitan antara peningkatan penerimaan pajak, penurunan konsumsi masyarakat, dan peningkatan investasi dengan perubahan pada tabungan masyarakat dan suku bunga. Peningkatan penerimaan pajak telah berdampak menurunkan konsumsi yang selanjutnya menyebabkan tabungan masyarakat meningkat dan kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga. Hasil penelitian Hakim dan Bujang (2012) mengkonfirmasi bahwa peningkatan pendapatan pajak total yang berasal dari kenaikan pajak penjualan barang dan jasa akan menurunkan konsumsi, tetapi penurunan konsumsi mendorong kenaikan saving kotor. Hal serupa disampaikan Guven (2012) bahwa masyarakat yang membuat keputusan mengkonsumsi lebih sedikit saat ini akan lebih banyak melakukan saving untuk tujuan masa depan.

Terkait dengan peningkatan saving dan penurunan suku bunga, Ariff, *et al.* (2012) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar menyebabkan penurunan suku bunga yang mana hal ini terkait dengan peningkatan likuiditas yang menyebabkan terjadi ekspansi pada kredit. Sementara Lin, *et al.* (2018) menunjukkan bahwa terdapat efek yang sangat besar pada pertumbuhan investasi sebagai akibat dari suku bunga yang rendah. Hasil-hasil temuan pada literatur yang dicantumkan membenarkan hasil simulasi dampak peningkatan penerimaan pajak di Provinsi Riau terhadap penurunan konsumsi masyarakat, peningkatan tabungan, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Meskipun perubahan-perubahan pada indikator wilayah ini relatif kecil namun perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam membangun pertumbuhan ekonomi wilayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar 10% sudah cukup besar meningkatkan PAD, namun hanya menjadi bagian kecil di dalam pengeluaran pemerintah daerah.
2. Pada satu sisi, adalah baik bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluarannya, dan pada sisi lain pemerintah daerah perlu menggali lebih banyak sumber penerimaan lainnya selain pajak.
3. Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah harus dilakukan dengan hati-hati mengingat dampaknya menurunkan konsumsi masyarakat, sementara konsumsi sendiri merupakan penentu kuat di dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi wilayah.
4. Peningkatan penerimaan pajak daerah tidak berdampak menurunkan investasi swasta sehingga pengembangan investasi swasta oleh pemerintah daerah perlu dilakukan sebaik-baiknya guna mengimbangi dampak penurunan di dalam konsumsi oleh pajak.
5. Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan pemerintah daerah dengan memperluas jangkauan kepada wajib pajak potensial.

Daftar Pustaka

- Adenugba, A.A. and Ogechi, C.F., 2013. The effect of internal revenue generation on infrastructural development. A study of Lagos State internal revenue service. *Journal of Educational and Social Research*, 3(2), pp. 419-436.
- Ariff, M., Chung, T.F. and Shamsher, M., 2012. Money supply, interest rate, liquidity and share prices: A test of their linkage. *Global Finance Journal*, 23(3), pp.202-220.
- Asimiyu, A.G. and Kizito, E.U., 2014. Analysis of internally generated revenue and its implications On fiscal viability of State Governments in Nigeria. *Journal of empirical economics*, 2(4), pp.216-228.
- Baranová, V. and Janícková, L., 2012. Taxation of corporations and their impact on economic growth: the case of EU countries. *Journal of competitiveness*, 4(4), pp.96-108.
- Blanchard, O. and Johnson, D.R., 2013. *Macroeconomics 6th Edition*. New Jersey: Pearson Education.
- Ferede, E. and Dahlby, B. 2012. The Impact of Tax Cuts on Economic Growth: Evidence from the Canadian Provinces. *National Tax Journal*. Vol. 65 (3), pp. 563-594.
- Güven, C., 2012. Reversing the question: Does happiness affect consumption and savings behavior?. *Journal of Economic Psychology*, 33(4), pp.701-717.
- Hakim, T.A. and Bujang, I., 2012. The Impact and Consequences of Tax Revenues' Components on Economic Indicators: Evidence from Panel Groups Data. In *International Trade from Economic and Policy Perspective*. InTech.
- Harelimana, J.B. 2018. The Role of Taxation on Resilient Economy and Development of Rwanda. *Journal of Financial-Marketing*, Vol. 2 (1), pp. 28-39.
- Hodo, M., 2013. The Effect of Taxes on Investment: Albanian Case. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2(11), pp.116-121
- Intriligator, M., R. Bodkin and C. Hsiao. 2003. *Econometric Models, Techniques, and Applications*. Second Editions. Prentice-Hall International, Inc.
- Kamaroellah, R.A., 2015. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Iqtishadia*, 2(01), pp.117-130.

- Kementerian Keuangan, RI. 2015. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kiprotich, B.A., 2016. Principles of Taxation. *governance*.
- Koutsoyiannis, A. 2000. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Second Edition. The MacMillan Press Ltd, London.
- Lin, X., Wang, C., Wang, N. and Yang, J., 2018. Investment, Tobin'sq, and interest rates. *Journal of Financial Economics*.
- Macek, R. 2014. The Impact of Taxation on Economic Growth: Case Study of OECD Countries. *Review of Economic Perspectives*. Vol. 14 (4), pp. 309-328.
- Mankiw, N.G. 2013. Macroeconomics. Eighth Edition. Worth Publishers, New York.
- Mufidah, A. dan Susyanti, J., 2017. Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(02), pp.29-44.
- Nizar, M.A. 2011. Siklikalitas Kebijakan Fiskal di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Vol. 14 (1), pp. 56-82.
- Omodero. C.O., Ekwe. M.C., and Ihendinihu. J.U. 2018. The impact of internally generated revenue on economic development in Nigeria. *Accounting and Finance Research*, 7(2), pp.166-173.
- Padda, I.U. and Akram N. 2009. The Impact of Tax Policies on Economic Growth: Evidence from South-Asian Economies. *The Pakistan Development Review*. 48 : 4 Part II, pp. 961-971.
- Pindyck R.S. and Rubinfeld. D.L. 2008. Econometric Models and Economic Forecast. Fourth Edition. Irwin McGraw-Hill. New York.
- Salome, I.O., E.L. Ibanichuka, and F.N. Akani. 2016. A Time Series Analysis of Effect of Tax Revenue on Economic Development of Nigeria. *Journal of Developing Country Studies*. ISSN 2224-607X (Paper), ISSN 2225-0565 (Online). Vol. 6 (9) : 65-70.
- Samuel, S.E. and Tyokoso, G., 2014. Taxation and revenue generation: An empirical investigation of selected states in Nigeria. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 4(1), pp.102-114.
- Taha, R. and Loganathan, N., 2008. Causality between tax revenue and government spending in Malaysia. *The International Journal of Business and Finance Research*, 2(2), pp.63-73.
- Waluyo, J., 2009. Peranan Pajak untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), pp.154-171.
- Zahari, M., 2017. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), pp.133-148.